

SKRIPSI

**KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA GARUNTUNGAN, KABUPATEN BULUKUMBA**

**MUHAMMAD ARSYAD
E011171010**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Muhammad Arsyad (E011171010). Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba. xv + 80 Halaman + 26 Tabel + 7 Gambar + 28 Pustaka + Lampiran. Dibimbing oleh Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si dan Dr. Suryadi Lambali, MA

Kepercayaan publik merupakan sikap yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka mendukung implementasi atas kebijakan dan program yang telah direncanakan. Untuk memperoleh kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa maka perlu memperhatikan variabel kepercayaan publik. Variabel tersebut digunakan dalam mengukur kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Garuntungan. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner, dan berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Garuntungan sebesar 48,3%.

Kata kunci: Kepercayaan Publik, Pengelolaan Dana Desa, Desa Garuntungan



HASANUDDIN UNIVERSITY

FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE

ABSTRACT

Muhammad Arsyad (E011171010). Public Trust in Garuntungan Village Fund Management, Bulukumba Regency. xv + 80 Pages + 26 Tables + 7 Pictures + 28 References + Attachments. Supervised by Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si and Dr. Suryadi Lambali, MA

Public trust is the attitude given by the community towards the government in order to support the implementation of the policies and programs that have been planned. To gain public trust in the management of village funds, it is necessary to pay attention to the variable of public trust. These variables are used to measure public trust in the management of village funds.

This study aims to analyze how much influence public trust has on the management of village funds in Garuntungan Village. This study uses a quantitative type with a survey method. The data collection technique is a questionnaire, and is based on documents related to the problem under study.

The results of this study indicate that there is an influence of public trust on the management of village funds in Garuntungan Village by 48.3%.

Keywords: Public Trust, Village Fund Management, Garuntungan Village



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arsyad

NIM : E011171010

Program Studi : Administrasi Publik

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba" Adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 3 Agustus 2021

Yang menyatakan



Muhammad Arsyad

E011171010



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Arsyad
NIM : E011 17 1010
Program Studi : Ilmu Administasi Publik
Judul :Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Garuntungan, Kabupaten Bulukumba

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Agustus 2021

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si
NIP. 19570507 198403 1 002


Dr. Suryadi Lambali, MA
NIP. 19590118 198503 1 006

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,


Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Arsyad
NIM : E011 17 1010
Program Studi : Ilmu Administasi Publik
Judul : Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Garuntungan, Kabupaten Bulukumba

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Agustus 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si
Sekertaris : Dr. Suryadi Lambali, MA
Anggota : 1. Dr. Nurdin Nara, M.Si
2. Drs. Lutfi Atmansyah, M. Si

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba”. Tak lupa pula Shalawat serta Salam senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab.

Begitu banyak tantangan dan kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, tidak memutuskan semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Penulis Samoddin yang selalu mendukung dan memberikan nasihat selama menjalani proses perkuliahan dan untuk Ibunda Almarhumah Najma yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis. Semoga gelar ini menjadi salah satu kado terindah yang dapat penulis berikan kepada almarhumah Ibunda tercinta. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan kepada penulis mulai dari kecil hingga berada di fase saat ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, serta kasih sayang yang diberikan.

Kemudian pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, staf dan jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta wakil dekan, staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Nurdin Nara, M. Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai dosen penguji skripsi yang senantiasa memberikan saran dan kritik yang membangun.
4. Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S. Sos, M. AP selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si. selaku penasehat akademik selama kurang lebih delapan semester sekaligus dosen pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi saya, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
6. Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA. selaku dosen pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi saya, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
7. Bapak Drs. Lutfi Atmansyah, M. Si. selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin selama kurang lebih 4 (empat) tahun telah memberikan bimbingan, didikan, motivasi, dan arahan yang diberikan selama perkuliahan.
9. Para staf Departemen Ilmu Administrasi dan staf di lingkup FISIP Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali.
10. Bapak Misbang selaku Kepala Desa Garuntungan beserta jajarannya, terima kasih atas sambutan dan pemberian data-data yang menunjang penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Saudara Hisbullah, Nurul Fuadi, Suriadil, Isra (Cira'), Kakanda Akbar beserta Keluarga Besar Karang Taruna Desa Garuntungan yang telah membantu saya selama proses penelitian.
12. UKM PENCAK SILAT PANCA SUCI FISIP UNHAS serta pihak-pihak dalam lingkungannya sebagai lembaga yang menjadi tempat saya berproses sebagai Pimpinan Lembaga.
13. Kanda Syahyadi, Kanda Sul, Kanda Sem, Kanda Rival, Kanda Aswandi, Kanda Arman, Kanda Eril, Kanda Fadlul, Kanda Ahmad, Kanda Aso', Ayunda Inna, Kanda Agung, dan Ayunda Eni yang telah memberikan pelajaran dan arahan selama berada di UKM Pencak Silat Panca Suci.
14. LEADER (Loyalty and Educated of Administrative Generation) 2017 yang telah menjadi saudara selama empat tahun ini. Terima kasih atas cerita, warna, perjuangan, kebersamaan, dan pengalamannya.
15. HUMANIS FISIP UNHAS serta pihak-pihak dalam lingkungannya sebagai lembaga pertama yang menerima saya sebagai kadernya, terima kasih atas pelajaran, pengalaman, dan nilai-nilai yang diberikan, di lembaga ini juga saya mendapatkan banyak teman yang berharga.
16. PC. IMM Makassar Timur serta pihak-pihak dalam lingkungannya sebagai lembaga eksternal kampus pertama yang menerima saya sebagai kadernya, terima kasih atas pelajaran, pengalaman, dan nilai-nilai yang diberikan, di lembaga ini juga saya mendapatkan banyak teman yang berharga.
17. Keluarga Besar Kampus Gagasan (Masyita, Mardiyah, Dlarmila) sebagai tempat saya mendapatkan pengalaman berharga mengelola suatu komunitas dan terkhusus kepada Kanda Rizal Pauzi, S. Sos., M.Si yang telah mengajarkan berbagai banyak hal.

18. Terkhusus saya berterima kasih kepada Tomi, Izzatul Mubarakah Juawing, Fadillah Febrianti Jafar, Masyita Marsuki dan Rifqiyani Nur Fadillah yang menjadi teman semangat dan teman bermalas-malasan saya sekaligus partner dalam berorganisasi.
19. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua dalam lindungannya Aamiin.

Makassar, 3 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II. 1 Konsep Kepercayaan Publik.....	8
II.1.1 Pengertian Kepercayaan Publik	8
II.1.2 Dimensi Kepercayaan Publik	13
II.2 Konsep Manajemen	22
II.2.1 Pengertian Manajemen.....	22
II.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen.....	23
II.3 Pengelolaan Dana Desa	24
II.3.1 Pengertian Dana Desa.....	24
II.3.2 Sumber Dana Desa	25
II.3.3 Pengelolaan Keuangan Desa	26
II.4 Penelitian Terdahulu.....	28
II.5 Kerangka pikir.....	28
II.6 Hipotesis Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

III.1 Pendekatan Penelitian	30
III.2 Jenis/Tipe Penelitian.....	30
III.3 Lokasi Penelitian.....	31
III.4 Jenis Data.....	31
III.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
III.6 Populasi dan Sampel	32
III.6.1 Populasi.....	32
III.6.2 Sampel	32
III.7 Defenisi Operasional variabel Peneitian.....	34
III.8 Teknik Analisis Data	36
III.8.1 Uji Instrumen.....	36
III.8.1.1 Uji Validitas	38
III.8.1.2 Uji Reliabilitas	38
III.8.1.3 Uji Normalitas Data	38
III.8.1.4 Uji Statistik.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
IV.1.1 Sejarah singkat Desa Garuntungan.....	41
IV.1.2 Keadaan Geografis dan Topografi Desa Garuntungan.....	44
IV.1.3 Keadaan Demografi Desa garuntungan.....	45
IV.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Desa Garuntungan.....	45
IV.2.1 Visi	45
IV.2.2 Misi.....	45
IV.2.3 Tujuan	46
IV.2.4 Sasaran.....	47
IV.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Garuntungan	49
IV.4 Penggunaan Anggaran Dana Desa	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
V.1 Identitas Responden.....	51
V.2 Hasil Uji Instrumen	60

V.2.1 Hasil Uji Validitas.....	60
V.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	60
V.2.3 Uji Normalitas Data.....	60
V.3 Hasil Uji Statistik.....	64
V.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	64
V.3.2 Analisis Koefisien Korelasi.....	65
V.3.3 Koefisien Determinansi.....	66
V.3.4 Uji F.....	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
VI.1 Kesimpulan	68
VI.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar IV.1 Petas Desa Garuntungan	45
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Garuntungan	49
Gambar V.1 Karakteristik Jenis Kelamin.....	52
Gambar V.2 Karakteristik Usia Responden.....	54
Gambar V.3 Karakteristik Pendidikan Responden	55
Gambar V.4 Karakteristik Pekerjaan Responden.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Anggaran Dana Desa.....	3
Tabel I.2 Kondisi Pengelolaan Dana Desa.....	4
Tabel II.1 Perbedaan Kepercayaan Sosial dan Kepercayaan Politik.....	9
Tabel II.2 Fungsi-Fungsi Manajemen.....	23
Tabel II.3 Fungsi Manajemen Robbins dan Calter	24
Tabel III.1 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	39
Tabel IV.1 Sejarah Perkembangan Desa Garuntungan	42
Tabel IV.2 Penggunaan Anggaran Dana Desa	49
Tabel V.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	51
Tabel V.2 Karakteristik Usia Responden.....	53
Tabel V.3 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden	54
Tabel V.4 Karakteristik Pekerjaan Responden.....	56
Tabel V.5 Tabulasi Silang Usia dengan Pekerjaan	57
Tabel V.6 Tabulasi Silang Usia dengan Pendidikan.....	58
Tabel V.7 Tabulasi Silang Pekerjaan dengan Pendidikan	59
Tabel V.8 Hasil Uji Validitas Kepercayaan Publik.....	60
Tabel V.9 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Dana Desa.....	61
Tabel V.10 Hasil Uji Reliabilitas Kepercayaan Publik.....	62
Tabel V.11 Hasil Uji Reliabilitas Pengelolaan Dana Desa	62
Tabel V.12 Hasil Uji Normalitas Data	63
Tabel V.13 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	64
Tabel V.14 Analisis Koefisien Korelasi.....	65
Tabel V.15 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	65
Tabel V.16 Koefisien Determinansi.....	66

Tabel V.17 Anova	66
Tabel V.18 Rangkuman Pengujian Hipotesis	67

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Publik atau masyarakat tentu menginginkan pemerintahnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini juga memberikan gambaran kinerja terhadap pemenuhan harapan dari masyarakat. Menurut Lipsky, harapan mendasar yang melekat pada birokrasi adalah kebutuhan masyarakat menjadi hal yang utama dan kepercayaan publik bergantung pada akuntabilitas saat mereka bekerja (Rahayu dan Juwono, 2019:122). Ketika masyarakat dapat memberikan kepercayaan berupa dukungan terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam bentuk partisipasi dan kerja sama tentu memberikan manfaat kepada pemerintah itu sendiri.

Sejak pertama kali dana desa dialokasikan pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa agar mampu bersaing dengan daerah perkotaan dalam hal pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan. Oleh sebab itu, Desa telah diberikan kewenangan dalam rangka mengelola segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan pemerdayaan masyarakat. Anggaran dana desa ini akan dikelola oleh tiap-tiap pemerintah desa yang akan diterima secara bertahap. Dengan adanya dana desa ini, pemerintah desa harus mampu mengelolanya dengan baik. Semakin besar anggaran yang

diterima, tentu disertai pula dengan tanggung jawab yang besar dalam pengelolaannya. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur mengenai pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan proses pertanggungjawaban terhadap keuangan desa.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menetapkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanganan dampak pandemi *Covid-19*. Terkait penanganan dampak pandemi *Covid-19* dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. Peraturan ini menjadi regulasi turunan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dan penanganan pandemi *Covid-19* dapat berjalan sesuai amanat Undang-Undang Desa.

Desa Garuntungan merupakan wilayah administratif yang terdapat di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 13,75 km². Desa Garuntungan terdiri dari lima dusun yakni: Dusun A'nisia, Dusun Borong Ganjeng, Dusun Kalimulasa, Dusun Dapurua, dan Dusun

Borong Barua. Desa Garuntungan merupakan salah satu daerah di Kecamatan Kindang yang menerima anggaran dana desa.

Berikut ini adalah tabel mengenai anggaran dana setiap desa di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2020.

Tabel I.1 Anggaran Dana Desa Kecamatan Kindang Tahun 2020

Nama Desa	Pagu Dana Desa setiap desa (ribu rupiah)
Mattirowalie	926.839
Kindang	1.165.616
Anrihua	977.458
Tamaona	1.015.513
Benteng Palioli	1.113.206
Balibo	1.007.007
Garuntungan	1.043.173
Orogading	984.019
Sipaenre	862.183
Kahayya	1.219.871
Somba Palioli	876.553
Sopa	902.200
Jumlah	12,093,638

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2020

Pemerintah Desa Garuntungan sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, peran dari seorang kepala desa sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa yang telah direncanakan dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Forum musrenbang inilah yang menentukan arah pembangunan desa selama enam tahun kedepan dengan memanfaatkan dana desa yang telah diterima. Jika pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan maksimal, pemerataan dan pembangunan yang adil di desa dapat terwujud.

Pengelolaan dana desa secara umum di Desa Garuntungan sudah memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti pelibatan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam **proses perencanaan**. Selanjutnya pada **tahap pelaksanaan**, terdapat program yang tidak terlaksana yaitu pelatihan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) padahal telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020. Selain itu, pada tahap **pelaporan** keuangan desa masih mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena keterlambatan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada proses pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya. Hal ini menunjukkan rendahnya kapasitas dan kapabilitas aparat desa dalam proses pelaporan atas dana desa yang dikelola.

Berikut ini tabel mengenai kondisi pengelolaan dana desa di Desa Garuntungan.

Tabel I.2 Kondisi Pengelolaan Dana Desa

Tahapan	Kondisi
Perencanaan	Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan
Pelaksanaan	Terdapat program yang tidak terlaksana.
Pelaporan	Keterlambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan desa

Kemudian, kesuksesan sebuah program pembangunan desa sangat bergantung dari partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpanggil untuk berpartisipasi dan turut menjaga suksesnya program pembangunan (Hasniati, 2016). Salah satu variabel yang tidak kalah pentingnya untuk mengukur kepercayaan publik adalah kejujuran. Variabel kejujuran ini menjadi salah satu variabel penting dalam mengukur kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dana desa setiap tahunnya yang mengalami peningkatan.

Namun berdasarkan temuan Unit Tipikor Satreskrim Polres Bulukumba terdapat penyalahgunaan anggaran dana desa yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang dan Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Untuk kasus Desa Bontobaji terdapat kerugian negara sebesar Rp 500 juta dari penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016-2017. Sementara di Desa Kindang, kerugian negara diduga mencapai Rp 900 juta, akibat penyalahgunaan dana desa di tahun 2017-2018. Jika digabungkan, penyalahgunaan anggaran di dua desa ini merugikan negara Rp 1.4 Miliar (*makassar.tribunnews.com diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 16.30 WITA*). Penyalahgunaan anggaran dana desa ini memberikan gambaran bahwa terdapat perilaku yang tidak jujur dalam mengelola dana desa. Perilaku yang tidak jujur ini dapat menggerus kepercayaan

publik terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tentunya perilaku yang tidak jujur ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di daerah yang lain.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang **“Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Garuntungan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Garuntungan.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi sebagai referensi tentang kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

2. Manfaat praktis

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan kepercayaan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1 Konsep Kepercayaan Publik

II.1.1 Pengertian Kepercayaan Publik

Secara umum, konsep kepercayaan publik (*public trust*) dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Berdasarkan perspektif politik, Blind menjelaskan bahwa kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur. Artinya, ketika pemerintah mampu melaksanakan apa yang telah dijanjikan melalui kebijakan yang dihasilkan secara efisien, adil dan jujur maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah dapat diberikan suatu kepercayaan. Sedangkan dari perspektif sosial, kepercayaan sosial merujuk pada kepercayaan warga terhadap warga lainnya dalam suatu komunitas atau masyarakat. Secara sederhana, dalam menjalani kegiatan sehari-hari tidak ada rasa saling curiga antar sesama warga lainnya sehingga timbul rasa aman ketika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. (Dwiyanto, 2011:355-360).

Secara konseptual, kepercayaan politik dengan kepercayaan sosial memiliki suatu perbedaan menurut beberapa ahli. Uslaner menjelaskan bahwa kepercayaan sosial adalah kepercayaan terhadap orang-orang (*trust in people*) sedangkan Hardin mengemukakan bahwa kepercayaan politik sebagai kepercayaan seseorang terhadap pemerintah atau sebuah institusi. Adapun perbedaan antara kepercayaan sosial dengan kepercayaan politik secara rinci sebagai berikut:

Tabel II.1 Perbedaan Kepercayaan Sosial dan Kepercayaan Politik

Tipe	Deskripsi
<i>Sosial Trust</i>	a. Percaya pada orang/masyarakat
	b. Berasal dari sosialisasi melalui orang tua.
	c. Kepercayaan sosial adalah kepercayaan umum, yang tidak ditujukan kepada orang tertentu untuk tujuan tertentu. Itu adalah kepercayaan, keyakinan, atau keyakinan pada orang asing. Oleh karena itu, konsep kepercayaan sosial berada di luar konsep interpersonal “kita versus mereka” yang didasarkan pada pengalaman, pengelompokan (misalnya, pendidikan, etnis, budaya, jenis kelamin, lokasi geografis, dan tingkat pendapatan), dan asosiasi (misalnya, persahabatan, kekerabatan, dan tetangga).
	d. Kepercayaan sosial mencerminkan optimisme jangka panjang.
<i>Political Trust</i>	a. Kepercayaan politik adalah kepercayaan pada institusi dan aktor (misalnya, eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, polisi, media, sektor swasta atau bisnis, organisasi non-pemerintah, dan organisasi regional atau internasional).
	b. Berasal dari keanggotaan grup, kebijakan pemerintah, atau label umum dukungan dan kepuasan politik.
	c. Kepercayaan politik adalah kepercayaan khusus, artinya kepercayaan yang didasarkan pada ikatan dalam suatu kelompok dan politik terhadap lembaga atau aktor tertentu.
	d. Konsep-konsep yang terkait dengan kepercayaan politik termasuk kemanjuran politik, yang ditentukan oleh daya tanggap pemegang jabatan terhadap konstituen dan warga negaranya (akuntabilitas), dan sinisme politik, yang merupakan evaluasi negatif dari sifat inheren politik.
	e. Kepercayaan pada pemerintah mencerminkan hasil jangka pendek, evaluasi terhadap pemimpin dan lembaga tertentu.
	f. Kepercayaan politik adalah kinerja pemerintah dikurangi ekspektasi.

Sumber: Kumagai, Saki dan Federica Lorio,

Dengan adanya kepercayaan publik, menunjukkan perasaan positif dari masyarakat terhadap birokrasi dan para pejabatnya. Perasaan positif dari kepercayaan ini dapat berupa perasaan senang, nyaman, serta mendukung pemerintah dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai feedback atau umpan balik dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, kepercayaan publik merupakan unsur penting karena menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan negara. Dalam mengelola negara, pemerintah membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan publik guna meraih kepercayaan publik sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif (Rahayu dan Juwono 2019:117).

Selain itu, konsep kepercayaan berkaitan erat dengan risiko dan harapan. Kepercayaan ini diharapkan dapat menjadi pengganti risiko serta mengurangi ketidakpastian dan serta menurunnya kompleksitas sosial untuk mengantisipasi masa depan. Coleman (1990) menjelaskan, kepercayaan menggambarkan ekspektasi akan keuntungan atau kerugian yang nantinya menentukan apakah seseorang akan memberikan kepercayaan atau tidak (Rahayu dan Juwono 2019:118).

Kemudian dalam konsep *Good Governance*, terdapat beberapa pilar kepercayaan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Partisipasi, semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.

- b. Penegakan hukum, Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif.
- c. Transparansi, Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan Feedback atau Outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.
- d. Responsif, pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat-nya, jangan menunggu mereka menyampai-kan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.
- e. Kesetaraan dan keadilan, sebagai sebuah bangsa beradab, dan terus berupaya menuju cita tata kelola pemerintahan yang baik, proses pengelolaan pemerintahan itu harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.
- f. Akuntabilitas, merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kemenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Nawawi, 2012:23-27).

Boukaert dan Van De Walle (Dwiyanto, 2011:384-389) menjelaskan manfaat adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah antara lain:

- a. Pertama, kepercayaan publik dapat mengurangi biaya transaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kedua, adanya kepercayaan terhadap pemerintah dapat mendorong warga untuk lebih menghormati otoritas yang dimiliki para pejabat publik.
- c. Ketiga, kepercayaan publik dapat meningkatkan kehangatan hubungan antara pemerintah dan warga.
- d. Keempat, kepercayaan publik sangat diperlukan dalam mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa definisi kepercayaan publik menurut beberapa ahli antara lain:

- a. Hetherington (1999) menjelaskan bahwa kepercayaan publik adalah konsep yang digunakan sebagai basis orientasi dalam melakukan evaluasi terhadap pemerintah yang didasarkan kepada seberapa baik pemerintah beroperasi sesuai dengan harapan normatif dari publik. (Rahayu dan Juwono, 2019: 119)
- b. Kepercayaan publik adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam institusi sosial atau sistem (Straten, et al., 2002)
- c. Kepercayaan publik merupakan dimensi penting untuk meningkatkan legitimasi dan kinerja pemerintahan yang demokratis (Putnam 1993).

- d. Kepercayaan publik dipandang sebagai salah satu modal sosial yang dapat mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Houston, 2012). dalam (Haning, M. Thahir, et al. 2018)
- e. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. (Mardiyanta, 2013:9)
- f. Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah termasuk didalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Wahyuningsih, 2011: 37).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai definisi kepercayaan publik, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik (*public trust*) adalah sikap yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka mendukung implementasi atas kebijakan dan program yang telah direncanakan.

II.1.2 Dimensi Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik sebagaimana yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli dapat dipahami secara berbeda melalui sudut pandang yang digunakan. Maka dari itu perlu dijelaskan dimensi dalam mengukur tingkat kepercayaan publik. Dalam kajian literatur tentang dimensi kepercayaan terhadap e-government (Haning, M. Thahir et al, 2018) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur suatu kepercayaan. Dimensi tersebut digunakan dalam mengukur kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kelima dimensi tersebut antara lain:

a. Kepercayaan pada data yang tersimpan (*Trust in Stored Data*)

Dimensi ini menjelaskan bahwa data yang disimpan dapat diakses dengan mudah, diungkapkan, dan data tersebut aman dari penyalahgunaan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak berkepentingan.

b. Kepercayaan pada sistem transaksi (*Trust in Transaction*)

Dimensi ini berkaitan dengan keamanan dan perlindungan pada saat melakukan transaksi terutama dalam hal reponsivitas permasalahan, transparansi, efisiensi, komunikasi, kegunaan, serta kemudahan penggunaan.

c. Kepercayaan pada pelayanan (*Trust in Services*)

Dimensi kepercayaan ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan fasilitas layanan yang disediakan.

d. Kepercayaan terhadap sistem (*Trust in System*)

Dimensi kepercayaan ini mengacu pada persepsi bahwa pengoperasian sistem e-government tidak dapat dikompromikan yang menyiratkan bahwa sistem menunjukkan ketersediaan, intolenrasi kesalahan, dan stabil dalam merespon.

e. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah (*Trust in Government Organization*)

Dimensi kepercayaan ini mengindikasikan masyarakat percaya terhadap pemerintah bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk kepentingan warga negara.

Selain itu, dalam literatur lain terdapat tiga dimensi dimensi kepercayaan publik yaitu dimensi kognisi, dimensi afeksi, dan dimensi perilaku (Dwiyanto, 2011: 366). Tiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Dimensi Kognisi

Dimensi kognisi ini dapat dipahami bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terwujud ketika terjadi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat secara intensif. Proses interaksi tersebut akan mempengaruhi proses pembentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik akan menilai bahwa institusi dan para pejabatnya bersifat terbuka, informasi dapat diakses dengan mudah, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga membentuk suatu *cognitive knowledge*.

Dengan adanya *cognitive knowledge* tersebut membuat publik menjadi terbuka dan tanggap terhadap pemerintahnya. Namun bagi publik yang kurang berinteraksi dengan pemerintah akan memperoleh pengetahuan kognitif tersebut ketika memiliki afiliasi (hubungan) politik dengan pemerintah atau pejabat publik, sosialisasi dari pemerintah atau publik memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dalam lingkungan masyarakat sehingga mampu memberikan penilaian terhadap pemerintah.

b. Dimensi Afeksi

Dimensi afeksi dalam mengukur kepercayaan publik memberikan gambaran melalui hubungan emosional antara publik dengan pemerintah dan pejabatnya. Hubungan emosional ini akan tercipta ketika warga dan pemerintah melakukan interaksi dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Terutama pelibatan warga dan pemangku kepentingan dalam

setiap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika terjadi hubungan yang semakin intensif antara pemerintah dan warganya maka akan tercipta *emotional attachment* antara warga dengan pemerintah dan setiap kebijakan yang dihasilkan. Pada akhirnya, tingkat kognisi dan afeksi dari kepercayaan publik akan semakin kuat.

c. Dimensi Perilaku

Pada dimensi ini, kepercayaan publik dipengaruhi oleh perilaku institusi penyelenggara negara dan para pejabatnya. Perilaku ini mencakup tiga hal yaitu:

1. Kepedulian pemerintah dan para pejabat publik dalam memenuhi kebutuhan setiap warganya.
2. Kemampuan pemerintah dan para pejabat publik dalam mengelola kepentingan warga.
3. Komitmen pemerintah dan para pejabatnya dalam menepati janji yang telah disampaikan kepada warga.

Secara ringkas, kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Ketiga dimensi kepercayaan publik diatas, yakni dimensi kognisi, dimensi afeksi, dan dimensi perilaku menggambarkan dimensi penting dalam kepercayaan publik. Ketiga dimensi tersebut, menjadi penentu dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kemudian, Kim (2005) dalam (Dwiyanto, 2011: 368) mengkaji kembali variabel-variabel dari penelitian-penelitian terdahulu dan sampai pada kesimpulan bahwa dalam mengukur suatu kepercayaan publik, terdapat lima variabel yang dapat digunakan yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi,

dan keadilan. Adapun penjelasan terkait kelima variabel tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

a. Komitmen yang Kredibel (Credible Commitment)

Para ilmuwan politik telah lama menggunakan variabel ini untuk menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Variabel tersebut termasuk yang paling sering digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik. Ada beberapa penjelasan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan komitmen yang kredibel.

Hardin (dalam Kim, 2005) dalam (Dwiyanto, 2011:369) menjelaskan komitmen kredibel sebagai “*encapsulated interest of government actor to honor her agreement or to act according to certain standart*”. Komitmen yang kredibel, menurut Hardin memiliki dua unsur, yaitu adanya *encapsulated interest* dan konsistensi. Pemerintah dinilai memiliki komitmen yang kredibel apabila warga percaya bahwa ada *encapsulated interest* antara dirinya dan aktor-aktor dari institusi pemerintah, yaitu apa yang menjadi kepentingan warga juga menjadi kepentingan para pejabat birokrasi pemerintah, atau setidaknya warga percaya bahwa tindakan pemerintah dan para pejabatnya selalu didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) atau melindungi kepentingan dan harta benda warga. *Encapsulated Interest* terjadi apabila kepentingan warga selalu menjadi pertimbangan para pejabat publik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.

Unsur kedua dari komitmen yang kredibel adalah konsistensi dari tindakan pemerintah dan pejabatnya. Apabila warga menganggap pemerintah dan pejabatnya konsisten dalam mengambil tindakan ketika menghadapi

masalah tertentu dan tindakan itu selalu menggambarkan kepedulian pemerintah terhadap kepentingan warga, warga cenderung menilai pemerintah dan para pejabatnya memiliki komitmen yang kredibel terhadap kepentingan warga.

b. Baik Hati (*Benevolence*)

Keyakinan warga bahwa pemerintah dan para pejabatnya memiliki niat baik dan kepedulian yang tulus (*genuine*) terhadap kepentingan warga sering menjadi penjelasan mengapa warga memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dan pejabatnya dinilai memiliki ketulusan yang tinggi dan niat yang baik apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak akan mengambil manfaat dari ketidakberdayaan warga. Pemerintah dinilai tulus ketika para pejabatnya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan warga walaupun warga tidak mengontrolnya. Hal itu terjadi apabila pemerintah dan para pejabatnya bersedia membantu warga walaupun sebenarnya mereka tidak harus melakukannya dan ketika melakukan itu mereka didorong oleh motivasi ekstrinsik. Melayani dan memenuhi kebutuhan warga sudah semestinya menjadi panggilan hati mereka sebagai pejabat publik.

Perspektif seperti ini yang mendorong para ilmuwan administrasi publik untuk menjelaskan pentingnya mengembangkan *benevolent bureaucrats*. Dalam literatur administrasi publik, konsep ini telah lama dikembangkan untuk menjelaskan karakteristik seorang administrator yang memiliki kepedulian yang tulus dan semangat tinggi untuk melayani warga (Hart dalam Kim, 2005) dalam (Dwiyanto, 2011:370). Administrator yang seperti itu cenderung menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membantu menyelesaikan

permasalahan-permasalahan publik yang dihadapi warga dan selalu berusaha memahami kepentingan warga. Administrator yang memiliki niat baik dan sikap pengabdian yang tulus tidak akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merugikan warga, walaupun warga mungkin tidak mengetahuinya. Mereka juga tidak akan mengkhianati amanat yang telah diberikan warga, bahkan sebaliknya mereka akan selalu bersedia berkorban untuk kepentingan warga.

Variabel ini penting untuk menjelaskan mengapa terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Semakin punahnya sosok administrator dan pejabat publik yang tulus dan peduli dalam profil birokrasi pemerintah telah membuat kepercayaan warga terhadap pemerintah cenderung memudar. Ketika orientasi pada kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok semakin kuat, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara cenderung semakin memudar dalam kehidupan administrator publik. Karena itu, tidak mengherankan apabila kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin merosot. Investasi dalam pengembangan administrator dan pejabat publik yang cenderung mengarah pada penguasaan kemampuan teknis dan kurang memperhatikan internalisasi nilai-nilai luhur, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, serta nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang tinggi membuat sikap lulus dan pengabdian kepada publik menjadi barang langka dalam kehidupan institusi negara dan para pejabatnya.

c. Kejujuran (*Honesty*)

Pentingnya kejujuran sebagai variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik juga telah banyak dikutip oleh para peneliti. Berman (1997) dan Nye (1997) dalam (Dwiyanto, 2011:371) menggunakan

kejujuran sebagai variabel yang penting untuk menjelaskan perubahan kepercayaan publik. Ketika warga menilai pemerintah dan para pejabatnya tidak jujur, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah,

Persepsi tentang kejujuran pemerintah dan para pejabatnya dapat terbentuk dari penilaian terhadap perilaku pejabat publik ketika menyelenggarakan pelayanan publik atau dari berbagai sumber informasi termasuk dari media yang memberitakan perilaku para pejabat dalam menjalankan kekuasaan dan mandat dari rakyat. Pengetahuan warga tentang perilaku pemerintah dan para pejabatnya turut mempengaruhi tinggi-rendahnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Kualitas interaksi warga dengan pemerintah dan para pejabatnya juga memengaruhi penilaian warga tentang kejujuran pemerintah dan pejabatnya dalam menjalankan kekuasaan. Ketika warga memiliki kesan bahwa para pejabat publik telah menjalankan kekuasaannya secara jujur, warga dapat dengan tenang menyerahkan nasibnya untuk diurus oleh para pejabat publik tersebut. Situasi seperti itu menunjukkan adanya tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Sebaliknya, jika warga merasa bahwa pejabat publik tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, warga tentu akan merasa tidak tenang atau was-was ketika menyerahkan urusan publik kepada pemerintah dan berusaha melakukan berbagai cara untuk mengontrol tindakan para pejabat publik.

d. Kompetensi

Variabel selanjutnya dalam mengukur kepercayaan publik adalah variabel tentang kompetensi dari pemerintah dan pejabat publik. Kompetensi ini berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas dari pemerintah dan

pejabatnya dalam menjalankan tugasnya. Institusi pemerintah dan para pejabat publik dituntut untuk memahami masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kemudian mampu menghasilkan suatu tindakan sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kemampuan pejabat publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan inilah yang dapat mendorong terciptanya hubungan emosional (*afeksi*) antara warga dengan pemerintah dan para pejabat publik menjadi semakin kuat.

e. Keadilan

Variabel terakhir dalam mengukur kepercayaan publik adalah variabel tentang keadilan. Keadilan ini dinilai pada saat pemerintah dan pejabat publik memberikan pelayanan secara adil berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan tanpa membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggara pelayanan publik harus menghindari pelayanan yang diskriminatif berdasarkan hubungan kekeluargaan, ras, agama maupun pilihan politik. Ketika terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu akan memberikan pengaruh negatif terhadap kepercayaan publik.

Dalam kaitan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Ketika pemerintah dan para pejabatnya mampu mengelola dana desa dengan baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa agar tercipta kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

II.2 Konsep Manajemen

II.2.1 Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari Bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam Bahasa Italia *maneggiare* yang berarti “mengendalikan”, kemudian Bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.

Menurut George R. Terry (Efendi, 2015:3) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Wibowo (2011) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Malayu SP. Hasibuan (2005) menjelaskan pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. (Hasibuan, 2005:3).

Selain itu, Robert Kreitner (Arsyad, 2002:2) menjelaskan bahwa *management is the process of working with and through others to achieve organizational objective in a changing environment* (Manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang selalu berubah). Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (Efendi, 2015:4) mendefinisikan manajemen adalah suatu proses melakukan

koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja agar disesuaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

II.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Pada awal abad ke-20, Henry Fayol mengusulkan bahwa manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu: *Plannig*, *Organizing*, *Commanding*, *Coordinating*, dan *Controlling*. Kemudian, fungsi-fungsi manajemen ini semakin berkembang dan menghasilkan beberapa pendapat dari praktisi, teoritikus maupun penulis diantaranya:

Tabel II.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-Fungsi Manajemen	
Sondang P. Siagian	<i>Planning, Organizing, Motivating, Controlling</i> (POMC)
George R. Terry	<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i> (POAC)
Koontz dan O'Donnel	<i>Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling</i> (POSDC).
James F. Stoner	<i>Planning, Organizing, Leading, Controlling</i> (POLC)
Luther Gullick	<i>Planning, Organizing, Staffiing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting</i> (POSDCORB)
The Liang Gie	<i>Planning, Decision Making, Directing, Coordinating, Controlling, Improving</i> (PDDCCI)

Sumber: Effendi, Usman 2015.

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri atas:

- a. Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan yang memuat rencana dan tindakan yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia dalam organisasi agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana.
- c. Kepemimpinan (*Leading*) merupakan kemampuan manajer dalam mengarahkan dan memengaruhi anggota agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- d. Pengendalian (*Controlling*) merupakan usaha dari seorang manajer agar organisasi tetap pada jalurnya dalam rangka pencapaian tujuan.

Selain itu, Robbins dan Calter (1999) menjelaskan beberapa fungsi-fungsi manajemen yaitu:

Tabel II.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

Planning	Organizing	Leading	Controlling
Menetapkan sasaran, Merumuskan tujuan, Menetapkan strategi, Membuat Strategi, dan mengembangkan subrencana untuk mengoordinasikan kegiatan	Menentukan apa yang perlu dilaksanakan, cara pelaksanaannya, dan siapa yang melaksanakannya..	Mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dan memecahkan pertentangan	Memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan diselesaikan seperti yang direncanakan.

Sumber: Stephen P. Robbins & Mary Coulter (1999)

II.3 Pengelolaan Dana Desa

II.3.1 Pengertian Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pasal (1) ayat (2) bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang digunakan oleh tiap-tiap pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam menunjang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Tujuan adanya Dana Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Buku Pintar Dana Desa, 2017: 14).

Dana Desa tersebut dianggarkan oleh Pemerintah setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% secara bertahap. Setiap Desa memiliki jumlah anggaran yang berbeda disebabkan karena Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain:

- a. Jumlah Penduduk.
- b. Angka Kemiskinan.
- c. Luas Wilayah, dan
- d. Tingkat Kesulitan Geografis dari masing-masing desa.

II.3.2 Sumber Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 menjelaskan tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini menjadi dasar hukum kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Adapun sumber pendapatan dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten//Kota.
- d. Alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

II.3.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Penggunaan dana desa yang telah disalurkan pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa dalam mengelolanya sesuai dengan kewenangan desa setempat dengan tetap memperhatikan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi beberapa tahapan (Bihamding, 2019:66) yaitu:

- a. Perencanaan.

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa

yang akan datang. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar dalam menyusun APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

b. Pelaksanaan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi dari APB Desa dalam satu tahun anggaran yang meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, serta perubahan APB Desa.

c. Penatausahaan.

Penatausahaan merupakan suatu proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan.

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan realisasi pelaksanaan APB Desa yang dilakukan secara semesteran; semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

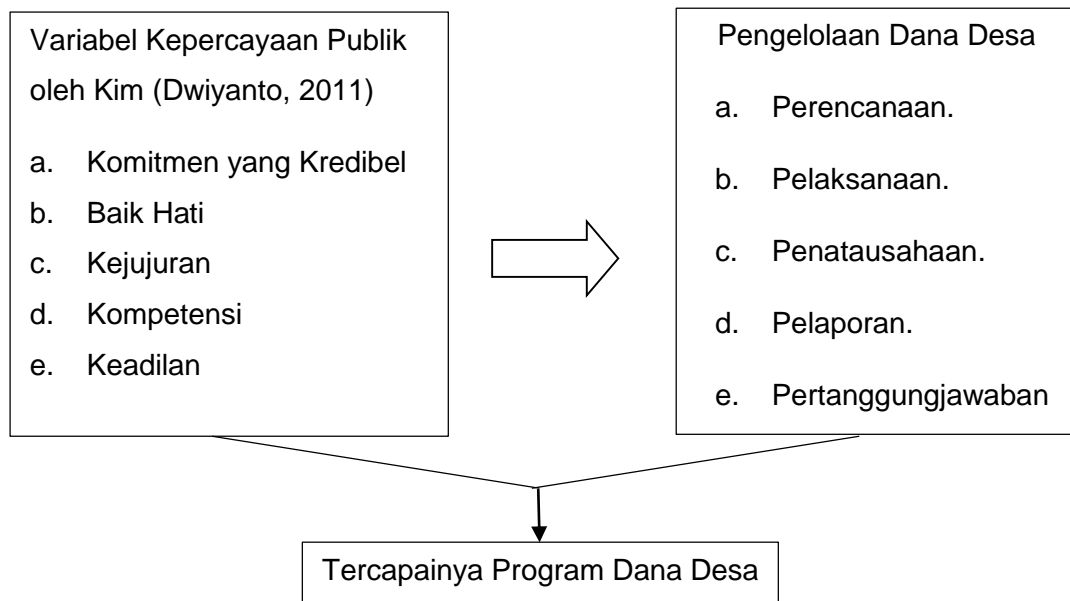
II.4 Penelitian Terdahulu

Pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan pemanfaatan aplikasi SisKeuDes. Selain itu, dalam rangka partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpenggil untuk berpartisipasi dan turut menjaga suksesnya program pembangunan. (Hasniati, 2016:27)

II.5 Kerangka pikir

Berdasarkan variabel yang digunakan oleh Kim (2005 dalam Dwiyanto 2011) dalam mengukur kepercayaan publik yakni komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi dan keadilan dan variabel dalam mengukur pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Bihamding, 2019:66). Kemudian masing-masing variabel tersebut menjadi variabel yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian terkait Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pikir yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini penelitian ini yaitu;



Gambar II.1 Kerangka Pikir

II.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang relevan (Sugiyono, 2018, 111). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hipotesis deskriptif yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri (Sugiyono, 2013, 74). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_0 : Tidak Terdapat pengaruh kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Garuntungan.

H_a : Terdapat pengaruh kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Garuntungan.